

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 106
ATAS PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA
PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
NUR SAFARAH YAHDİYANI
NIM. 09412141020

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 106
ATAS PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA
PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2015**

SKRIPSI

Oleh:
NUR SAFARAH YAHDYANI

09412141020

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal 13 Juli 2016

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

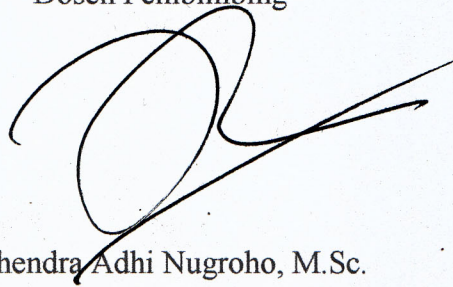
Program Studi Akuntansi

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui,

Dosen Pembimbing



Mahendra Adhi Nugroho, M.Sc.

NIP. 19831120 200812 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 106
ATAS PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA
PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2015**


yang disusun oleh:

NUR SAFARAH YAHDIYANI

09412141020

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Juli 2016 dan
dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
RR. Indah Mustikawati, M.Si., Ak.	Ketua Penguji		29/07/16
Mahendra Adhi Nugroho, M.Sc.	Sekretaris Penguji		01/08/16
Mimin Nur Aisyah, M.Sc., Ak.	Penguji Utama		28/07/16

Yogyakarta, 20 Juli 2016

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Dr. Sugharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Safarah Yahdiyani

NIM : 09412141020

Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : **ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 106 ATAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2015**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.

Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Demikian pernyataan ini saya buat dalam kesadaran dan tidak ada unsur paksaan.

Yogyakarta, 13 Juli 2016

Peneliti,



Nur Safarah Yahdiyani

NIM. 09412141020

MOTTO

“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku”.

(QS. Al Baqarah: 152)

“Siapa yang menolong memberi nafas baru (melegakan) kepada seorang mukmin yang mengalami kesusahan yang menyesakkannya dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah menolong melegakan kesusahan yang menyesakkannya dan kesusahan-kesusahan hari kiamat”.

(Abu Hurairah r.a.)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ibu Dra. Afrikani Asiyah dan Bapak Drs. Jaafar Usman, untuk kasih sayang, pengorbanan, dan tangisan dalam doa-doanya.
2. Almh. Nenek, Hj. Siti Sakdiyah, yang telah mengasuh dan mendidik penulis sejak kecil.
3. Mas Ali, Mba Ocha, dan Keisha, untuk setiap kesabaran, doa, dan motivasi yang telah diberikan.
4. Tante Lisa dan Om Tofah untuk waktu dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 106
ATAS PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA
PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2015**

Oleh:
Nur Safarah Yahdiyani
NIM. 09412141020

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015.

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, sedangkan objek penelitian adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta yang meliputi: (1) pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, namun, pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena dihitung berdasarkan proyeksi; (2) pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106; (3) penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, hal itu dikarenakan tidak adanya pengelompokan unsur-unsur neraca; dan (4) pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *musyarakah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *musyarakah*.

Kata kunci: Pembiayaan *Musyarakah*, PSAK No. 59, PSAK No. 106

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PSAK NO. 59 AND PSAK NO.106
ON MUSHARAKA FINANCING
IN PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA 2015**

By:

Nur Safarah Yahdiyani

NIM. 09412141020

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the compliance of implementation of accounting for recognition, measurement, presentation, and disclosure of musharaka financing transactions with PSAK No. 59 and PSAK No. 106 in BPRS Formes Sleman, Yogyakarta for 2015.

This study was a qualitative descriptive study. The variables of this study was musharaka financing in BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. The research subject was BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, while the research objects were recognition, measurement, presentation, and disclosure of musharaka financing transactions. Data collection techniques of this study were interview and documentation. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach.

The results of this study show that financial statements of BPRS Formes Sleman, Yogyakarta which include: (1) recognition of musharaka financing consisting of investment recognition, loss recognition, revenue recognition, and expense recognition are generally in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106, however, profit recognition of this transaction is not in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106 because it is calculated based on projections; (2) measurement of musharaka financing in general is in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106; (3) presentation of musharaka financing is not fully in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106, it is because there is no categorization of elements of balance sheet; and (4) disclosure of musharaka financing is not fully in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106, the incompliances are caused by a lack of disclosure of allowance for musharaka investment losses and impairment losses for musharaka assets.

Keywords: Musharaka Financing, PSAK No. 59, PSAK No. 106

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamiin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Sholawat serta salam tercurah kepada Baginda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah membimbing umat manusia kepada cahaya kebenaran.

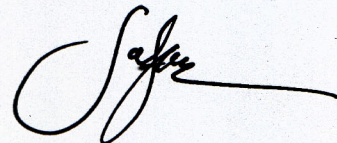
Terselesaikannya skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 atas Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta Tahun 2015” tidak akan terwujud tanpa kebaikan hati dari berbagai pihak yang memberi bantuan, bimbingan, dan dorongan, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA, Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Mahendra Adhi Nugroho, M.Sc., Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, serta dosen pembimbing yang telah bersabar dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, kritik, dan motivasi selama penyusunan skripsi kepada penulis hingga selesai.
5. Mimin Nur Aisyah, M.Sc., Ak., dosen narasumber sekaligus Penguji Utama yang telah memberikan masukan, kritik, saran, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. RR. Indah Mustikawati, M.Si. Ak., Ketua Penguji yang telah memberikan dukungan dan motivasi guna menyempurnakan skripsi ini.
 7. Dhyah Setyorini, M. Si., Ak., Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan, dukungan, dan motivasi guna menyempurnakan skripsi ini.
 8. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
 9. Direktur dan karyawan PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA yang telah membantu dan memberi ijin pada peneliti untuk melakukan penelitian.
 10. Sahabat-sahabat terbaik, Nuzul Dwi Iswanti, Fairuz Silvi Fajari, Debia Nur Epita, Citra Istiqomah, dan Imaniar Hidayati Arindha atas doa, semangat, dan sentilan selama ini.
 11. Teman-teman AKASIA 2009 atas doa dan inspirasi yang telah diberikan.
 12. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
- Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 13 Juli 2016

Peneliti,



Nur Safarah Yahdiyani

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	9
a. Definisi BPRS	9
b. Karakteristik BPRS	10
c. Tujuan BPRS	11
d. Produk BPRS	12
e. Larangan bagi BPRS	13
2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	14
a. Definisi Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	14

b. Klasifikasi <i>Musyarakah</i>	15
c. Rukun <i>Musyarakah</i>	16
3. PSAK No. 59	17
a. Karakteristik <i>Musyarakah</i>	17
b. Bank sebagai Mitra	19
c. Penyajian	22
d. Pengungkapan	30
4. PSAK No. 106	31
a. Karakteristik <i>Musyarakah</i>	31
b. Pengakuan dan Pengukuran <i>Musyarakah</i>	33
c. Akuntansi untuk Mitra Aktif	33
d. Akuntansi untuk Mitra Pasif	36
e. Penyajian <i>Musyarakah</i>	38
f. Pengungkapan <i>Musyarakah</i>	39
B. Penelitian yang Relevan	39
C. Kerangka Berpikir	41
D. Pertanyaan Penelitian	42
BAB III. METODE PENELITIAN	44
A. Tempat dan Waktu Penelitian	44
B. Desain Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Instrumen Penelitian	47
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Deskripsi Data Umum	50
a. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Sleman, Yogyakarta	50
b. Struktur Organisasi PT. BPRS Sleman, Yogyakarta	51
c. Visi dan Misi PT. BPRS Sleman, Yogyakarta	52
2. Deskripsi Data Khusus	53

a. Mekanisme Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	53
b. Pertumbuhan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	55
c. Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	55
d. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta	57
e. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta	59
f. Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta	59
g. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta	60
B. Analisis Data	60
1. Analisis Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106	61
a. Pengakuan Investasi	61
b. Pengakuan Kerugian	61
c. Pengakuan Keuntungan	63
d. Pengakuan Piutang	65
e. Pengakuan Beban	66
2. Analisis Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106	68
3. Analisis Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106	69
4. Analisis Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106	70
C. Pembahasan	71
1. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106	71
2. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106	73
3. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106	74

4. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106	75
D. Keterbatasan Penelitian	76
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penerapan Syarat dan Rukun pada Praktik <i>Musyarakah</i>	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	83
2. Neraca Juni 2015.....	84
3. Laporan Laba Rugi Juni 2015	85
4. Laporan Komitmen dan Kontijensi Juni 2015	86
5. Laporan Kualitas Aktiva Produktif&Infomasi Lainnya Juni 2015	87
6. Laporan Distribusi Bagi Hasil Juni 2015	88
7. Neraca September 2015	89
8. Laporan Laba Rugi September 2015	90
9. Laporan Komitmen dan Kontijensi September 2015	91
10. Laporan Kualitas Aktiva Produktif&Infomasi Lainnya September	
2015	92
11. Neraca Desember 2015.....	93
12. Laporan Desember 2015.....	94
13. Laporan Komitmen dan Kontijensi Desember 2015	95
14. Laporan Kualitas Aktiva Produktif&Infomasi Lainnya Desember	
2015	96
15. Laporan Distribusi Bagi Hasil Desember 2015	97

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam sektor ekonomi merupakan pembangunan yang tidak sedikit mengeluarkan biaya karena itu diperlukan lembaga-lembaga keuangan sebagai penyedia kebutuhan dana di Indonesia, salah satunya adalah bank. Berdasarkan pasal 1 butir 2 pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan sendiri selama lebih dari satu dekade ini telah berkembang sangat pesat, khususnya perbankan syariah. Sejak berdirinya Bank Muamalat pada tanggal 1 Mei 1992, perbankan syariah ikut serta dalam memajukan perekonomian Indonesia. Perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil memang telah dicita-citakan oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil ini menjadi alternatif instrumen keuangan bagi masyarakat yang memiliki pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, sedangkan dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat dua jenis perbankan syariah, yaitu:

1. Bank Umum Syariah (BUS) yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah serta di dalamnya terdapat kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah, namun kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Berbeda dengan BUS yang memiliki kegiatan dan pangsa pasar yang besar, BPRS merupakan bank yang memfokuskan diri pada aktivitas ekonomi masyarakat lemah pada suatu daerah tertentu. Sesuai dengan pengertiannya bahwa bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, BPRS juga menjalankan fungsi yang sama. BPRS menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 90) menjelaskan bahwa “secara umum, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharadah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*”. Namun pada praktiknya, akad yang sering digunakan adalah akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang ideal karena pembiayaan ini menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*) dan prinsip bagi

hasil kerugian (*loss sharing*). Kerugian pada pembiayaan *mudharabah* akan ditanggung oleh bank, kecuali bila nasabah melakukan kelalaian yang disengaja sehingga menyebabkan kerugian. Sedangkan kerugian pada pembiayaan *musyarakah* ditanggung oleh pihak bank dan nasabah sesuai dengan proporsi modal yang diberikan.

Menurut Muhammad Akhyar Adnan (2005), masih terdapat beberapa kelemahan dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu rentan terjadi penyimpangan karena pihak nasabah tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai. Selain itu, terdapat pengertian seolah pihak bank tidak memiliki hak untuk intervensi dalam usaha yang sedang dilaksanakan oleh nasabah. Kondisi-kondisi tersebut seringkali membuat pihak bank menentukan nisbah bagi hasil relatif cukup besar bagi pihak bank. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* dapat menjadi solusi yang menarik bagi permasalahan di atas.

Penulis sepakat dengan penelitian di atas bahwa pembiayaan *musyarakah* dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi permasalahan pembiayaan *mudharabah*. Walaupun pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan *musyarakah* memiliki beberapa poin lebih dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu: 1) pihak bank dan nasabah menyediakan modal sesuai jumlah yang telah disepakati, 2) bank memiliki hak untuk ikut serta dalam pengelolaan usaha bersama nasabah, dan 3) keuntungan dari usaha akan dibagi antara

pihak bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian usaha akan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diberikan.

BPRS sebagai perbankan syariah yang melakukan aktivitas pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi. BPRS berkewajiban untuk melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dan selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dana dan aset yang dikelola dan sebagai sarana utama bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga penyusun standar akuntansi telah menyusun PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2003. Kemudian, IAI kembali menyusun enam PSAK Syariah yang disahkan pada 27 Juni 2007 dan berlaku mulai 1 Januari 2008. Enam PSAK Syariah tersebut meliputi PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, PSAK No. 103 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK No. 104 tentang Akuntansi *Istishna'*, PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, dan PSAK No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*. PSAK-PSAK Syariah inilah yang menjadi pedoman dasar akuntansi keuangan syariah bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank.

Dengan adanya PSAK No. 59 yang mengatur tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK No. 106 yang mengatur tentang Akuntansi *Musyrakah*, BPRS sebagai salah satu bagian dari perbankan syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansi atas pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No 106. Penerbitan PSAK Syariah diharapkan dapat menjadi pedoman dalam praktik akuntansi bagi BPRS sehingga dalam menyusun laporan keuangan, BPRS dapat memenuhi ketentuan syariah yang ada.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Formes Sleman, Yogyakarta merupakan salah satu BPRS yang telah berdiri sejak tahun 2009. Sesuai dengan tujuannya sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BPRS Formes Sleman, Yogyakarta ikut serta untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan pembiayaan syariah, baik berupa modal tetap maupun modal usaha. Pemberian modal dalam bentuk pembiayaan syariah dipilih oleh BPRS Formes Sleman, Yogyakarta karena para pengusaha kecil dan menengah ternyata lebih dapat bertahan dan berkembang dalam kondisi krisis dan tetap dapat memberikan tingkat laba investasi yang besar. Hal ini dikarenakan mereka dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan usaha yang selalu berubah, serta dengan pengelolaan usaha yang sangat efisien.

Kendala yang dihadapi oleh BPRS Formes Sleman, Yogyakarta hampir sama dengan BPRS lainnya, yaitu pertama, minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang akuntansi syariah. Hal tersebut diperkuat

dengan hasil wawancara pendahuluan dengan staf bagian keuangan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Pada praktiknya, staf bagian keuangan BPRS tersebut masih belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang akuntansi syariah, khususnya tentang pembiayaan *musyarakah*. Kedua, nasabah yang terdiri dari pengusaha mikro, kecil, dan menengah masih 70% lebih belum mampu memahami dengan baik mengenai pembuatan laporan keuangan syariah sehingga pihak bank harus menuntun nasabah untuk membuat laporan keuangan yang *auditable*.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, bank memang telah melaksanakan prinsip syariah. Namun sejauh mana penerapan akuntansi syariah yang telah dilaksanakan, serta apakah penerapan akuntansi syariah tersebut telah sesuai dengan PSAK Syariah, belum diketahui. Maka dari itu, penulis mengambil judul “**Analisis Penerapan PSAK No. 59 dan PSAK NO. 106 atas Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta Tahun 2015**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut.

1. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi syariah terbatas.
2. Pemahaman dan kemampuan nasabah untuk menyusun laporan keuangan syariah masih kurang.

3. Kesesuaian penerapan akuntansi syariah dengan PSAK Syariah yang dilaksanakan oleh BPRS Formes Sleman, Yogyakarta belum diketahui.

C. Pembatasan Masalah

Berbagai masalah yang telah melatarbelakangi penelitian ini telah diuraikan dalam identifikasi masalah. Agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih fokus, perlu dilakukan pembatasan masalah, oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan pembiayaan *musyarakah* tahun 2015.

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi

pembiayaan *musyarakah* dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah dan akuntansi syariah.
- b. Memperkaya kepustakaan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank

Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai referensi dalam menerapkan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

b. Bagi Penulis

Menjadi sarana penerapan ilmu-ilmu yang telah dipelajari saat bangku kuliah dalam kehidupan nyata.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Definisi BPRS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 9, “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran”. Dalam ikhtisar undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan perubahan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Perubahan tersebut dilakukan untuk lebih menegaskan perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun pengertian prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa “prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatannya yang berupa menghimpun serta menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah Islam. BPRS akan memberikan pelayanan produk-produk penghimpunan dan

penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip syariah Islam untuk dioperasikan.

b. Karakteristik BPRS

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia menjelaskan tujuh karakteristik utama yang menjadi prinsip Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (www.fimadani.com, diakses pada tanggal 15 September 2015), yaitu:

1) Universal

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya ditujukan untuk seluruh segmen masyarakat tanpa membedakan kemampuan ekonomi maupun agama.

2) Adil

Melaksanakan dan memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya tanpa ada unsur *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakjelasan), haram, dan riba.

3) Transparan

Dalam kegiatannya, Bank Syariah sangat terbuka bagi seluruh segmen masyarakat.

4) Seimbang

Mengembangkan sektor keuangan melalui pengembangan sektor riil dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

5) Masalahat

Produk dan kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah memberikan manfaat bagi seluruh aspek kehidupan.

6) Variatif

Memberikan produk yang bervariasi, meliputi tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli dan sewa, produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran (*debit card, syariah charge*).

7) Fasilitas

Terdapat fasilitas penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan (*qard*), memiliki fasilitas ATM, *mobile banking*, *internet banking* dan interkoneksi antarbank syariah.

Karakteristik Bank Syariah di atas mencakup karakteristik pada BPRS, kecuali BPRS tidak memberikan layanan dalam jasa lalu lintas pembayaran. Selain itu, BPRS juga lebih berfokus pada kegiatan ekonomi masyarakat lemah.

c. Tujuan BPRS

Terdapat beberapa tujuan BPRS seperti yang diuraikan oleh Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio (1999: 96), antara lain:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lemah, khususnya untuk umat Islam.

- 2) Meningkatkan pendapatan per kapita.
- 3) Menambah lapangan pekerjaan di tingkat kecamatan.
- 4) Mengurangi arus urbanisasi.
- 5) Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPRS menawarkan produk-produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Produk-produk BPRS tersebut nantinya akan menjadi langkah bagi BPRS untuk ikut serta dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia.

d. Produk BPRS

Beberapa produk syariah yang dikeluarkan BPRS dijelaskan oleh Warkum Sumitro (2004: 129-130), meliputi:

- 1) Mobilisasi dana masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan amanah dengan akad *wadi'ah*.
 - b) Tabungan *wadi'ah*.
 - c) Deposito berjangka dengan akad *wadi'ah* maupun *mudharabah*.
- 2) Produk penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan *bai bitsaman ajil*, *murabahah*, *bai salam*, atau *istishna'*.
 - c) Pembiayaan dengan prinsip alih utang, yaitu pembiayaan *hiwalah*.

- d) Pembiayaan dengan prinsip pinjaman, yaitu pembiayaan *qardh*.
- 3) Jasa perbankan lainnya seperti jasa pembayaran berupa proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, dan lain-lain.

e. Larangan bagi BPRS

Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, terdapat beberapa larangan bagi BPRS. Larangan-larangan tersebut antara lain:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam jasa lalu lintas pembayaran.
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang bukan penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- 4) Melakukan kegiatan perasuransian yang bukan agen pemasaran produk asuransi syariah.
- 5) Melakukan penyertaan modal yang bukan pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah.
- 6) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditetapkan pada pasal 21.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Definisi Pembiayaan *Musyarakah*

Untuk lebih memahami penelitian ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pembiayaan dan *musyarakah*. Pertama, tentang pembiayaan telah didefinisikan oleh Muhammad (2005:17) sebagai “pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”. Definisi lain tentang pembiayaan diungkapkan oleh Muhammad Syafi’i Antonio (2001: 160) yang menyatakan bahwa “pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”.

Kedua, perlu diketahui bahwa kata *musyarakah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirkah* yang berarti mencampur. Sofyan S. Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf (2010: 35) memberikan pendapat bahwa “*musyarakah* adalah akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan”.

Pendapat lain diungkapkan oleh Adrian Sutedi (2009: 81) yang menyatakan bahwa:

Musyarakah adalah suatu bentuk organisasi usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usah, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagi menurut proporsi modal.

Pendapat lain yang senada dijelaskan oleh Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud (2007: 85-86) yang mengungkapkan bahwa:

Musyarakah dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Para mitra akan berbagi keuntungan sesuai dengan cara yang telah disepakati dan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi modal kerja.

Dari definisi-definisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan antara sekurangnya dua pihak (dalam konteks ini adalah bank dan nasabah) untuk mendanai suatu usaha dalam bentuk modal dan kerja. Dalam pembiayaan ini tidak hanya nasabah, namun pihak bank juga boleh ikut serta dalam manajemen tersebut. Keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yang diberikan.

b. Klasifikasi *Musyarakah*

Dalam PSAK No. 106, *musyarakah* diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

1) *Musyarakah* Permanen

Musyarakah permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

2) *Musyarakah* Menurun (*musyarakah mutanaqisah*)

Musyarakah menurun adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra

lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

c. Rukun *Musyarakah*

Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*, terdapat rukun dan ketentuan yang didasarkan atas Fatwa DSN MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

1) Pelaku yang terdiri atas para mitra

Terdapat dua jenis mitra dalam *musyarakah*, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut, sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*.

2) Objek *musyarakah*

Objek *musyarakah* dapat berupa modal maupun kerja. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Modal dalam bentuk aset harus dinilai dengan uang sesuai kesepakatan antara mitra, sedangkan ukuran kerja mitra ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

3) Ijab qabul

Ijab qabul merupakan serah terima antara bank dan nasabah yang dituangkan dalam hitam dan putih agar tiap pihak melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai porsinya.

4) *Nisbah* keuntungan/kerugian

Nisbah keuntungan harus ditentukan di awal akad untuk menghindari sengketa, sedangkan kerugian ditanggung oleh bank dan nasabah sesuai dengan proporsi modal yang diserahkan.

3. PSAK No. 59

PSAK No. 59 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi pada perbankan syariah. Perlakuan akuntansi atas akad *musyarakah* yang terdapat pada PSAK No. 59 meliputi:

a. Karakteristik *Musyarakah*

Karakteristik *musyarakah* pada PSAK No. 59 terdapat dalam paragraf 35 sampai dengan 40, antara lain:

- 1) *Musyarakah* adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan (PSAK No. 59, par 35).
- 2) Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank (PSAK No. 59, par 36).

- 3) Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten (PSAK No. 59, par 37).
- 4) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan (PSAK No. 59, par 38).
- 5) Laba *musyarakah* dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra, sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) (PSAK No. 59, par 39).
- 6) *Musyarakah* dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank

akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut (PSAK No. 59, par 40).

b. Bank sebagai Mitra

Bank sebagai mitra dijelaskan dalam PSAK No. 59 pada paragraf 41 sampai dengan 51, meliputi:

1) Pengakuan dan Pengukuran atas Pembiayaan *Musyarakah* Awal Akad

a) Pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra *musyarakah* (PSAK No. 59, par 41).

b) Pengukuran pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

(1) Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk:

(a) kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan

(b) aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan; dan

(2) biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada

persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah* (PSAK No. 59, par 42).

2) Pengukuran Bagian Bank atas Pembiayaan *Musyarakah* setelah Akad

- a) Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan modal *musyarakah*) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada (PSAK No. 59, par 43).
- b) Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan (PSAK No. 59, par 44).
- c) Jika akad *musyarakah* yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian bagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi bank pada periode berjalan (PSAK No. 59, par 45).

- d) Pada saat akad diakhiri, pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra (PSAK No. 59, par 46).
- 3) Pengukuran Laba atau Rugi *Musyarakah*
- a) Laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*, sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal (PSAK No. 59, par 47).
 - b) Apabila pembiayaan *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan, maka:
 - (1) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati; dan
 - (2) rugi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah* (PSAK No. 59, par 48).
 - c) Apabila pembiayaan *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka:
 - (1) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan *nisbah* yang disepakati; dan
 - (2) rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dengan

mengurangi pembiayaan *musyarakah* (PSAK No. 59, par 49).

- d) Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih *performing* diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan *musyarakah* yang *non performing* diakhiri, maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 59, par 50).
- e) Apabila terjadi rugi dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau kesalahan mitra (pengelola usaha) *musyarakah*, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*. Rugi karena kelalaian mitra *musyarakah* tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru (PSAK No. 59, par 51).

c. Penyajian

Penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan dalam PSAK No. 59 sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:
 - a) neraca;
 - b) laporan laba rugi;
 - c) laporan arus kas;

- d) laporan perubahan ekuitas;
- e) laporan perubahan dana investasi terikat;
- f) laporan sumber dan penggunaan dana *zakat*, *infak*, dan *shadaqah*;
- g) laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*; dan
- h) catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 59, par 152).

2) Neraca

- a) Unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas (PSAK No. 59, par 153).
- b) Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat, dilakukan secara terpisah. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian dalam neraca mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos aktiva berikut:

Kas;

Penempatan pada Bank Indonesia;

Giro pada bank lain;

Penempatan pada bank lain;

Efek-efek;

Piutang;

piutang *murabahah*;

piutang *salam*;

piutang *istishna'*;

piutang pendapatan *ijarah*;

Pembiayaan *mudharabah*;

Pembiayaan *musyarakah*;

Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien);

Aktiva yang diperoleh untuk *ijarah*;

Aktiva *istishna'* dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin *istishna'*);

Penyertaan;

Investasi lain;

Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan; dan

Aktiva lain (PSAK No. 59, par 154).

- c) Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas berikut:

Kewajiban;

Kewajiban segera;

Simpanan segera;

giro wadi'ah;

tabungan *wadi'ah*;

Simpanan bank lain;

giro wadi'ah;

tabungan wadi'ah;

Kewajiban lain;

utang salam;

utang istishna';

Kewajiban pada bank lain;

Pembiayaan yang diterima;

Keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan;

Utang pajak;

Utang lainnya; dan

Pinjaman subordinasi.

Investasi Tidak Terikat

Investasi tidak terikat dari bukan bank;

tabungan mudharabah;

deposito mudharabah;

Investasi tidak terikat dari bank;

tabungan mudharabah;

deposito mudharabah;

Ekuitas

Modal disetor;

Tambahan modal disetor; dan

Saldo laba (rugi) (PSAK No. 59, par 155).

d) Aktiva dan kewajiban tidak boleh disalinghapuskan kecuali ketentuan syariah dan hukum memperkenankan terjadinya saling hapus (PSAK No. 59, par 156).

e) Investasi tidak terikat adalah dana yang diterima oleh bank dengan kriteria sebagai berikut:

(1) bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana, termasuk hak untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya;

(2) keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati; dan

(3) bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian (PSAK No. 59, par 158).

3) Laporan Laba Rugi

Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian dalam laporan laba rugi mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban berikut:

Pendapatan operasi utama:

Pendapatan dari jual-beli:

pendapatan margin *murabahah*;

pendapatan bersih *salam* paralel;

pendapatan bersih *istishna'* paralel;

Pendapatan dari sewa:

pendapatan bersih *ijarah*;

Pendapatan bagi hasil:

pendapatan bagi hasil *mudharabah*;

pendapatan bagi hasil *musyarakah*;

Pendapatan operasi utama lainnya;

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat;

Pendapatan operasi lainnya;

Beban operasi lain;

Pendapatan non-operasi;

Beban non-operasi;

Zakat; dan

Pajak (PSAK No. 59, par 162).

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas dan PSAK No. 31 tentang Akuntansi Perbankan (PSAK No. 59, par 163).

5) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK No. 1 tentang Penyajian laporan Keuangan (PSAK No. 59, par 164).

6) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. (PSAK No. 59, par 165)

7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Zakat, Infak, dan Shadaqah*

Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan *zakat, infak, dan shadaqah* sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

a) sumber dana *zakat, infak, dan shadaqah* yang berasal dari penerimaan:

- (1) *zakat* dari bank syariah;
- (2) *zakat* dari pihak luar bank syariah;
- (3) *infak*; dan
- (4) *shadaqah*;

b) penggunaan dana *zakat, infak, dan shadaqah* untuk:

- (1) fakir;
- (2) miskin;
- (3) hamba sahaya (*riqab*);
- (4) orang yang terlilit utang (*gharim*);
- (5) orang yang baru masuk islam (*muallaf*);
- (6) orang yang berjihad (*fisabilillah*);
- (7) orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*); dan

(8) amil;

c) kenaikan atau penurunan sumber dana *zakat*, *infak*, dan *shadaqah*;

d) saldo awal dana penggunaan dana *zakat*, *infak*, dan *shadaqah*; dan

e) saldo akhir dana penggunaan dana *zakat*, *infak*, dan *shadaqah* (PSAK No. 59, par 172).

8) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*

Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

a) sumber dana *qardhul hasan* yang berasal dari penerimaan:

(1) *infak*;

(2) *shadaqah*;

(3) denda; dan

(4) pendapatan non-halal;

b) penggunaan dana *qardhul hasan* untuk:

(1) pinjaman;

(2) sumbangan;

c) kenaikan atau penurunan sumber dana *qardhul hasan*;

d) saldo awal dana penggunaan dana *qardhul hasan*; dan

e) saldo akhir dana penggunaan dana *qardhul hasan* (PSAK No. 59, par 178).

d. Pengungkapan

1) Pengungkapan untuk komponen Neraca

Bank syariah mengungkapkan dasar penentuan dan besar penyisihan kerugian pembiayaan *musyarakah* dan piutang yang berasal dari penyelesaian akad *musyarakah* pada suatu periode (PSAK No. 59, par 189).

2) Pengungkapan untuk komponen Laporan Laba Rugi

a) Pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi (PSAK No. 59, par 196).

b) Sejauh bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut di bawah ini berasal dari investasi yang dibiayai bersama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus diungkapkan secara terpisah:

(1) pendapatan dan keuntungan investasi;

(2) beban dan kerugian investasi;

(3) laba (rugi) investasi;

(4) bagian para pemilik dana investasi tidak terikat pada pendapatan (kerugian) dari investasi sebelum bagian pengelola dana;

(5) bagian bank pada pendapatan (kerugian) investasi; dan

(6) bagian bank pada pendapatan dan investasi tidak terikat sebagai pengelola dana (PSAK No. 59, par 197).

4. PSAK No. 106

PSAK No. 106 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi *musyarakah* yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Karakteristik *Musyarakah*

Karakteristik *musyarakah* pada PSAK No. 106 terdapat dalam paragraf 05 sampai dengan 12, antara lain:

- 1) Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya satu mitra dapat mengambil dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati *nisbahnya* secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain (PSAK No. 106, par 05).
- 2) Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas (PSAK No. 106, par 06).
- 3) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

- a) pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
 - b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (PSAK No. 106, par 07).
- 4) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang (PSAK No. 106, par 08).
- 5) Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas) atau sesuai *nisbah* yang disepakati oleh para mitra, sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas) (PSAK No. 106, par 09).
- 6) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya (PSAK No. 106, par 10).
- 7) Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati dari hasil usaha yang

diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan (PSAK No. 106, par 11).

- 8) Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri (PSAK No. 106, par 12).

b. Pengakuan dan Pengukuran *Musyarakah*

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut (PSAK No. 106, par 13).

c. Akuntansi untuk Mitra Aktif

1) Pada Saat Akad

- a) Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha *musyarakah* (PSAK No. 106, par 14).

- b) Pengukuran investasi *musyarakah*:

- (1) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan;
dan

- (2) dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah* (PSAK No. 106, par 15).

- c) Aset non-kas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:
 - (1) penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis; ditambah dengan
 - (2) penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non-kas untuk usaha *musyarakah* (PSAK No. 106, par 16).
- d) Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non-kas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru (PSAK No. 106, par 17).
- e) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah* (PSAK No. 106, par 18).
- f) Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi *musyarakah* dan di sisi lain sebagai dana *syirkah* temporer sebesar:
 - (1) dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan
 - (2) dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur

ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif (PSAK No. 106, par 19).

2) Selama Akad

a) Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

(1) jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau

(2) nilai wajar aset *musyarakah* non-kas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada) (PSAK No. 106, par 20).

b) Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah dana *syirkah* temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada) (PSAK No. 106, par 21).

3) Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban (PSAK No. 106, par 22).

4) Pengakuan Hasil Usaha

- a) Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban (PSAK No. 106, par 23).
- b) Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakat* (PSAK No. 106, par 24).
- c) Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah* (PSAK No. 106, par 25).
- d) Pengakuan pendapatan usaha *musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah (PSAK No. 106, par 26).

d. Akuntansi untuk Mitra Pasif

1) Pada Saat Akad

- a) Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif (PSAK No. 106, par 27).

b) Pengukuran investasi *musyarakah*:

(1) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan;
dan

(2) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:

(a) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau

(b) kerugian pada saat terjadinya (PSAK No. 106, par 28).

c) Investasi *musyarakah* non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada) (PSAK No. 106, par 29).

d) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra (PSAK No. 106, par 30).

2) Selama Akad

a) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

(1) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau

(2) nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada) (PSAK No. 106, par 31).

- b) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada) (PSAK No. 106, par 32).

3) Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang (PSAK No. 106, par 33).

4) Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana (PSAK No. 106, par 34).

e. Penyajian *Musyarakah*

- 1) Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

- a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*;

- b) Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer;
 - c) Selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas (PSAK No. 106, par 35).
- 2) Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:
- a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*;
 - b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah* (PSAK No. 106, par 36).

f. Pengungkapan *Musyarakah*

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain;
- 2) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- 3) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK No. 106, par 37).

B. Penelitian yang Relevan

- 1. Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 59 (Studi Kasus pada BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta) oleh Sari Asih Indah Diyanah (2008).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dikatakan bahwa pencatatan laporan dan pelaporan yang dilakukan oleh BPRS Margarizki Bahagia telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PAPSII.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah subjek penelitian yaitu BPRS, sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yang berupa pelaporan keuangan yang menggunakan pedoman PSAK No. 59 dan PAPSII.

2. Analisis Kesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK 105 (Studi pada 4 BMT di Jakarta Selatan) oleh Soraya (2011).

Penelitian yang relevan ini dilakukan di empat BMT, yaitu BMT Ta'awun, BMT Al-Kariim, BMT El-Syifa, dan BMT Daarul Qur'an. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa perlakuan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah* yang ada pada keempat BMT tersebut belum sesuai dengan PSAK 105. Salah satu ketidaksesuaian perlakuan akuntansi terjadi pada saat pengakuan dana yang diberikan kepada nasabah seharusnya dicatat sebagai investasi *mudharabah*.

Persamaan dengan penelitian ini adalah peneliti sama-sama menganalisis transaksi pembiayaan syariah dengan PSAK Syariah. Perbedaan dengan penelitian ini terlihat dari subjek dan objek penelitian.

3. Penerapan Akad *Musyarakah* dalam Pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pontianak oleh Neni Suryani (2013).

Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan dengan akad *musyarakah* yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pontianak telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian antara akad dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Musyarakah*.

Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang membahas tentang pembiayaan dengan akad *musyarakat*, sedangkan perbedaan penelitian adalah subjek penelitian. Pada penelitian ini subjek berupa Bank Umum Syariah (BUS). Selain itu, pedoman yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian prinsip syariah yang digunakan oleh subjek penelitian hanya didasarkan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional.

C. Kerangka Berpikir

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang memiliki beberapa kelebihan, yaitu pihak bank dan nasabah menyediakan modal sesuai jumlah yang telah disepakati, bank memiliki hak untuk ikut serta dalam pengelolaan usaha bersama nasabah, dan keuntungan dari usaha akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian usaha akan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Dari berbagai kelebihan tersebut, terlihat bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang ideal untuk dilakukan oleh bank dan nasabah karena pada pembiayaan ini terdapat prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*) dan bagi hasil kerugian (*loss sharing*).

Dalam melakukan praktik pembiayaan *musyarakah*, bank harus menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses

penyusunan laporan keuangan syariah ini terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang telah tertuang pada PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

Sebagai salah satu BPRS yang memberikan pembiayaan *musyarakah*, BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tentunya harus menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Laporan keuangan atas praktik pembiayaan *musyarakah* yang berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akan dibandingkan dan dianalisis penerapannya dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Dari analisis tersebut akan dapat diambil kesimpulan apakah penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas praktik pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan operasionalisasi rumusan masalah.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian pengakuan pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106?
2. Bagaimana kesesuaian pengukuran pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106?
3. Bagaimana kesesuaian penyajian pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106?

4. Bagaimana kesesuaian pengungkapan pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016. Tahap pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober dan November 2015, kemudian pada bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016 dilakukan penyusunan laporan penelitian.

B. Desain Penelitian

Sebuah penelitian memerlukan desain penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan tersusun sistematis. Seperti yang diungkapkan oleh Jonathan Sarwono (2006: 79) bahwa “desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

Sejalan dengan ungkapan tersebut, peneliti merencanakan desain penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sukmadinata (2009: 72) memberikan pendapat bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan mengkaji aktivitas, karakteristik, serta hubungannya dengan fenomena lain. Sedangkan metode kualitatif disimpulkan oleh Lexy J. Moleong (2006: 6) sebagai “penelitian yang

menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”.

Menurut peneliti, desain penelitian dengan penelitian deskriptif kualitatif sangat sesuai dengan penelitian ini karena penelitian deskriptif membantu peneliti dalam menggambarkan dan menguraikan kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan acuan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Metode kualitatif dipilih oleh peneliti karena metode ini membantu peneliti menuangkan hasil penelitian dalam kata-kata atau kalimat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dari penelitian ini adalah BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, sedangkan objek penelitian adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel penelitian diperlukan bagi peneliti untuk mempelajari serta mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian agar dapat mengambil kesimpulan penelitian (Sugiyono 2009: 49). Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, yaitu pembiayaan bersama antara pihak bank dan nasabah dalam

membiayai suatu usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No.106. PSAK No. 59 merupakan PSAK Syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi pada perbankan syariah, sedangkan PSAK No. 106 merupakan PSAK Syariah yang mengatur perlakuan akuntansi pada akad *musyarakah*.

Faktor-faktor yang menjadi penilaian dalam penelitian ini adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan acuan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2009: 224) berpendapat bahwasanya “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Dari pendapat tersebut peneliti menjelaskan tentang teknik pengumpulan data telah digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab guna memperoleh informasi secara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta.
2. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan dokumen berasal dari catatan dan dokumentasi tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi yang diperoleh adalah laporan keuangan atas pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara kepada pihak yang berwenang atas pembiayaan *musyarakah*. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang atas pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Sedangkan data sekunder adalah data internal berupa dokumen laporan keuangan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta pada tahun 2015 yang diakses di www.bi.go.id.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk diambil kesimpulan penelitian. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis data kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan Biklen dalam LP Wong (2008), bahwa:

Data analysis qualitative research is defined as the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, observation notes, or other non-textual materials that the researcher accumulates to increase the understanding of the phenomenon. (Analisis data kualitatif merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta data-data lain untuk menambah pemahaman dari hal yang diteliti.)

Langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan peneliti untuk menganalisis data dalam penelitian ini sesuai dengan Miles dan Huberman (1984), yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis (Emzir 2011: 64-65). Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan data laporan keuangan tahun 2015 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Data yang didapat kemudian dipilih dan disederhanakan untuk memudahkan proses analisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan acuan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Peneliti telah menyusun data dan hasil penelitian tentang kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015 yang telah dianalisis dalam bentuk teks naratif dan tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari teknis analisis ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Peneliti

menarik kesimpulan tentang kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta pada tahun 2015.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Umum

a. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta berdiri pada tanggal 19 Januari 2009 ditandai dengan *soft opening* yang dihadiri oleh Drs. H. Sri Purnomo, M.Si., Wakil Bupati Sleman yang menjabat pada saat itu, Prof. DR. H. Amir Mualim, M.A., Drs. H. M. Sularno, M.A., dan Dewan Komisaris, yaitu Madiyono, S.E. dan Toto Suparwoto, S.Pd.

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta sebagai lembaga investasi Syariah terus mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan pembiayaan berupa modal usaha. Dalam kenyataannya, para pengusaha mikro, kecil, dan menengah ternyata lebih dapat bertahan dan berkembang dalam kondisi krisis dan tetap dapat memberi tingkat keuntungan investasi. Hal ini dikarenakan mereka dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan usaha yang selalu berubah serta dengan pengelolaan usaha yang efisien.

Dalam waktu tiga tahun terakhir, BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan baik dari

permodalan maupun jumlah aset yang terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwa BPRS Formes Sleman, Yogyakarta semakin dipercaya oleh nasabah dan masyarakat dalam fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah.

Sesuai dengan visinya, BPRS Formes Sleman, Yogyakarta berusaha untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang tepercaya. Hingga akhir Desember 2015, total aset BPRS Formes Sleman, Yogyakarta telah mencapai lebih dari 27 miliar rupiah.

b. Struktur Organisasi PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dikelola oleh jajaran manajemen yang profesional dan berpengalaman. Kegiatan operasional BPRS Formes Sleman, Yogyakarta sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada RUPS. Pengawasan terhadap operasional bank dilakukan oleh Dewan Pengurus Syariah, yaitu:

- 1) Ketua DPS : Drs. H. Sri Purnomo, M.Si.
- 2) Anggota DPS : Prof. DR. H. Amir Mualim, M.A.
- 3) Anggota DPS : Drs. H. M. Sularno, M.A.
- 4) Komisaris Utama : Madiyono, S.E.
- 5) Komisaris : Toto Suparwoto, S.Pd,
- 6) Direktur Utama : Muhammad Rosyid, S.Ag.
- 7) Direktur : M. Abdul Azis, S.TP.

c. Visi dan Misi PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta memiliki Motto “Kepercayaan Anda Mensejahterakan Bersama”, yang mendukung terwujudnya visi BPRS, yaitu “Menjadi penyedia jasa keuangan syariah yang terkemuka dan profesional yang secara konsisten memberikan pengalaman interaksi yang terbaik”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPRS Formes Sleman, Yogyakarta memiliki misi-misi yang perlu dijalankan, yaitu:

- 1) Menjalankan usaha dengan hati-hati dan berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
- 2) Menyediakan produk dan jasa keuangan yang memberikan solusi atas kebutuhan keuangan nasabah dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
- 3) Membekali karyawan dengan pelatihan-pelatihan serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.
- 4) Melayani seluruh lapisan masyarakat dengan mempertahankan standar kualitas yang tinggi serta berusaha menjadi panutan dalam pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*).
- 5) Memberikan edukasi perbankan syariah kepada masyarakat secara optimal.

2. Deskripsi Data Khusus

Peneliti telah melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi pada salah satu produk pembiayaan pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, yaitu akuntansi pembiayaan *musyarakah*. Produk tersebut merupakan salah satu variabel penelitian. Variabel sebagai dasar untuk menganalisis pembiayaan *musyarakah* adalah PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta diperoleh data sebagai berikut:

a. Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah*

Mekanisme pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta merupakan langkah-langkah dalam penyaluran dana (pembiayaan) *musyarakah*. Pihak yang melakukan pembiayaan *musyarakat* dinamakan pihak I dari pihak bank dan pihak II dari nasabah yang mengajukan pembiayaan *musyarakah*.

Mekanisme pembiayaan *musyarakah* yang ada di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta meliputi proses sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke BPRS Formes Sleman, Yogyakarta untuk mengajukan pembiayaan.
- 2) Mengisi formulir permohonan pembiayaan *musyarakah*.
- 3) Melengkapi data administrasi seperti fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami-istri, fotokopi KK (Kartu Keluarga), fotokopi

surat nikah, fotokopi jaminan, dan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

- 4) Melakukan wawancara terkait pembiayaan.
- 5) Formulir pengajuan pembiayaan yang telah diisi kemudian di bahas oleh manajemen untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5C, yaitu:
 - a) *Character* atau kepribadian nasabah yang dimaksudkan untuk menilai kejujuran dan itikad baik nasabah sehingga tidak menyulitkan pelunasan pembiayaan di kemudian hari.
 - b) *Capacity* atau kemampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usahanya.
 - c) *Capital* atau modal usaha yang telah dimiliki oleh nasabah sehingga fungsi dari BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dalam penyediaan modal adalah sebagai pemberi modal tambahan saja.
 - d) *Collateral* atau jaminan yang mudah dicairkan.
 - e) *Condition of economy* atau prospek usaha nasabah.
- 6) Survei pembiayaan terkait data yang disampaikan dengan fakta di lapangan baik jaminan maupun kemampuan usaha termasuk tempat tinggal dan omset usaha nasabah. Apabila jaminan berupa kendaraan, akan dilakukan cek fisik sebagai keabsahan. Sedangkan untuk jaminan sertifikat akan dilakukan pengecekan di notaris. Hal ini dilakukan sebagai realisasi pencairan dana.

7) Jika pembiayaan disetujui maka segera dilakukan pembuatan akad dan pencairan dana.

8) Catatan: usaha yang akan dibiayai telah berjalan setidaknya selama tiga bulan dan merupakan usaha yang halal.

b. Pertumbuhan Pembiayaan *Musyarakah*

Nominal pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta meningkat dari tahun 2013 sejumlah Rp600.024.000,00 menjadi Rp682.143.000,00 di tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 nominal pembiayaan *musyarakah* menurun menjadi Rp213.581.000,00. Hal tersebut dikarenakan sudah banyak mitra yang telah melunasi pembiayaan *musyarakah* yang telah mereka lakukan.

c. Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Akad pembiayaan *musyarakah* merupakan surat perjanjian antara pihak BPRS Formes Sleman, Yogyakarta sebagai pemilik dana (mitra pasif) dan nasabah sebagai pengelola dana (mitra aktif). Dalam akad, tertulis berapa besar pembiayaan yang diberikan BPRS kepada nasabah termasuk cara angsuran pembayaran nasabah kepada BPRS serta biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman tersebut.

Besarnya pembiayaan yang diberikan BPRS kepada nasabah tidak sepenuhnya sesuai dengan permintaan nasabah, namun dilihat dari hasil tinjauan pihak BPRS pada usaha yang dimiliki nasabah. Besar pembiayaan pada kisaran Rp5.000.000,00-Rp350.000.000,00

dapat langsung diberikan oleh BPRS setelah disetujui oleh Direktur Utama, sedangkan pinjam yang melebihi Rp350.000.000,00 memerlukan sindikasi dengan bank lain. Besar total setoran setiap angsuran terdiri dari titipan pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko ditetapkan pada awal akad beserta tanggal setoran awal dan tanggal jatuh tempo.

Akad pembiayaan *musyarakah* selesai apabila nasabah telah mengembalikan seluruh sisa pembiayaan serta kewajiban lainnya pada pihak BPRS. Apabila kewajiban belum terpenuhi dan nasabah berhenti membayar angsuran, BPRS akan mengirimkan surat pemberitahuan. Jika usaha nasabah masih dipandang layak namun tertunda dalam membayar bagi hasil, maka nasabah tetap berkewajiban membayar bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.

Tabel 1. Penerapan Syarat dan Rukun pada Praktik *Musyarakah*

No.	<i>Musyarakah</i>	Terpenuhi
1.	Rukun: Terdapat mitra aktif (nasabah) dan mitra pasif (BPRS).	✓
2.	Objek <i>musyarakah</i> berupa modal kerja maupun investasi.	✓
3.	Ada ijab kabul/ serah terima.	✓
4.	Ada nisbah keuntungan.	✓
1.	Syarat: Mitra pembiayaan harus cakap hukum dan baligh.	✓
2.	Akad dituangkan secara tertulis.	✓
3.	Modal berupa uang tunai.	✓
4.	Harus diketahui jumlahnya.	✓
5.	Diperuntukkan bagi kedua belah pihak yaitu BPRS dan nasabah.	✓
6.	Proporsi bagi hasil harus dijelaskan dalam akad.	✓
7.	Kerugian yang mungkin ditanggung sesuai dengan kesepakatan.	✓

Sumber: DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000

d. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan *Musyarakah*
di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta

1) Pengakuan Investasi

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengakui dana *musyarakah* dalam bentuk kas yang disalurkan sebagai pembiayaan *musyarakah* pada saat pencairan dana yang diberikan kepada nasabah. BPRS tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non-kas. Pencairan dana dilakukan sekali setelah akad pembiayaan *musyarakah* disepakati. Pembayaran angsuran pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap maupun jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara BPRS dan nasabah. Pembayaran

angsuran dapat dilakukan bertahap secara harian, mingguan, dan bulanan.

2) Pengakuan Kerugian

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengakui penurunan nilai investasi sebagai kerugian yang mengurangi saldo pembiayaan *musyarakah* bila terbukti tidak ada kelalaian atau kesalahan yang disengaja dari pihak nasabah selaku mitra aktif. Kerugian dalam hal ini adalah kerugian yang disebabkan karena nasabah meninggal atau usaha hancur akibat bencana alam.

3) Pengakuan Keuntungan

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengakui keuntungan bagi hasil saat nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil. Pembayaran dapat dilakukan harian, mingguan, bulanan, maupun jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan persentase yang ditentukan pada awal akad.

4) Pengakuan Piutang

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengakui pembiayaan *musyarakah* dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah kepada BPRS sebagai piutang.

5) Pengakuan Beban

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tidak mengakui beban yang terjadi berkaitan dengan *musyarakah* sebagai pembiayaan

musyarakah. Kerugian akibat adanya kelalaian atau kesalahan nasabah dalam mengelola dana akan dibebankan kepada nasabah dan tidak mengurangi investasi *musyarakah*.

- e. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengukur pembiayaan *musyarakah* sejumlah uang yang dibayarkan BPRS kepada nasabah pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan *musyarakah* disetujui.

- f. Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta menyajikan total pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah dalam neraca sesuai dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta yang telah dibuat terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta merupakan laporan yang telah diringkaskan dan tidak menyajikan banyak pos. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disajikan dalam penjelasan atas pos-pos laporan keuangan.

g. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *musyarakah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha *musyarakah* yang tercantum pada akad pembiayaan *musyarakah*. BPRS mengungkapkan kegiatan BPRS dalam laporan usaha. Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dicantumkan dalam lampiran laporan keuangan. Dalam lampiran tersebut, Dewan Pengawas Syariah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang tidak konsisten dengan prinsip syariah, yaitu mengenai perhitungan nisbah bagi hasil. BPRS mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan untuk menilai perolehan aset dalam catatan atas laporan keuangan. BPRS mengungkapkan jumlah pembiayaan *musyarakah* pada neraca. Pendapatan dan beban diungkapkan berdasarkan karakteristik transaksi dalam laporan laba rugi.

B. Analisis Data

Kantor pusat BPRS Formes Sleman, Yogyakarta terletak di Jalan Gito-Gati Km. 1, Grojogan, Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta. BPRS memiliki kegiatan menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah, dan memberikan layanan jasa keuangan lainnya. Pembiayaan yang dilakukan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta adalah pembiayaan produktif (pembiayaan

mudharabah dan pembiayaan *musyarakah*), pembiayaan konsumtif (pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah*), dan pembiayaan untuk kebajikan (pembiayaan *qardhul hasan*).

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta menetapkan persentase bagi hasil 25:75, yakni 25% untuk pihak BPRS dan 75% untuk pihak nasabah, namun pada pelaksanaannya dapat dilakukan negosiasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Usaha yang didanai dengan pembiayaan *musyarakah* merupakan usaha yang sudah berjalan setidaknya selama tiga bulan. Dari usaha yang sudah berjalan tersebut, dapat diperkirakan besarnya pendapatan yang akan datang.

Dari data khusus berupa hasil wawancara dan dokumentasi mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah*, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

a. Pengakuan Investasi

Dalam PSAK No. 59 paragraf 41, pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra *musyarakah*. Begitu juga dengan PSAK No. 106 paragraf 27, investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Pada praktiknya, pembiayaan *musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta diakui saat pembayaran uang tunai kepada nasabah (mitra). Hal tersebut

menunjukkan bahwa praktik pengakuan investasi di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta telah sesuai dengan PSAk No. 59 dan PSAK No. 106.

b. Pengakuan Kerugian

Pengakuan kerugian diakui dalam PSAK No. 59 pada paragraf 49 dan paragraf 51, yaitu:

- 1) dalam paragraf 49, kerugian diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan *musyarakah* kerugian diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan *musyarakah*; dan
- 2) dalam paragraf 51, jika kerugian yang terjadi dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau kesalahan mitra (pengelola usaha) *musyarakah*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*; dan kerugian karena kelalaian mitra *musyarakah* tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

PSAK No. 106 menjelaskan pengakuan kerugian sebagai berikut:

- 1) dalam paragraf 24, kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*; dan

- 2) dalam paragraf 25, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*.

Sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengakui kerugian dengan cara sebagai berikut:

- 1) kerugian diakui sesuai dengan proporsi modal; dan
- 2) jika kerugian yang terjadi karena kesengajaan mitra, kerugian ditanggung oleh mitra (pengelola modal).

c. Pengakuan Keuntungan

Dalam PSAK No. 59, penjelasan tentang pengakuan keuntungan tertuang pada paragraf 48-50, yaitu:

- 1) apabila pembiayaan *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan, maka: laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati (paragraf 48);
- 2) apabila pembiayaan *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka: laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan *nisbah* yang disepakati (paragraf 49); dan
- 3) pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih *performing* diakui sebagai piutang kepada mitra; untuk pembiayaan *musyarakah* yang *non performing* diakhiri, maka laba yang belum diterima bank tidak

diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (paragraf 50).

Sementara dalam PSAK No. 106, pengakuan keuntungan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) dalam paragraf 09, keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas) atau sesuai *nisbah* yang disepakati oleh para mitra., sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas);
- 2) dalam paragraf 10, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya; bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya;
- 3) dalam paragraf 11, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan; dan
- 4) dalam paragraf 34, pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

Pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, pengakuan keuntungan dilakukan seperti di bawah ini:

- 1) pembayaran bagi hasil dilakukan pada setiap pembayaran angsuran pokok dan periode pembayaran telah disepakati pada awal akad; dan
- 2) pengakuan penghasilan usaha diakui dari persentase untuk menentukan perkiraan pendapatan penghasilan karena mayoritas pengelola dana adalah pedagang mikro dan kecil yang tidak membuat pembukuan.

Pengakuan keuntungan di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Pengakuan penghasilan usaha seharusnya diakui dari penghasilan usaha riil nasabah, bukan menggunakan persentase.

d. Pengakuan Piutang

PSAK No. 59 menjelaskan pengakuan piutang sebagai berikut:

- 1) dalam paragraf 46, pada saat akad diakhiri, pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra; dan
- 2) dalam paragraf 50, pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih *performing* diakui sebagai piutang kepada mitra untuk pembiayaan *musyarakah* yang *non performing* diakhiri, maka laba yang belum

diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam PSAK No. 106 paragraf 33, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif pada saat diakhiri diakui sebagai piutang. Sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengakui piutang sebagai berikut:

- 1) pembiayaan *musyarakah* yang belum dibayar oleh pengelola dana (nasabah) diakui BPRS sebagai piutang; dan
- 2) bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana akan diakui BPRS sebagai piutang.

e. Pengakuan Beban

Pengakuan beban diakui dalam PSAK No. 59 sebagai berikut:

- 1) dalam paragraf 42, biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*; dan
- 2) dalam paragraf 51, apabila terjadi rugi dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau kesalahan mitra (pengelola usaha) *musyarakah*, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*; rugi karena kelalaian mitra *musyarakah* tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

Sedangkan dalam PSAK No. 106, pengakuan beban dilakukan seperti di bawah ini:

- 1) dalam paragraf 18, biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakat*; dan
- 2) dalam paragraf 25, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*.

Sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, BPRS melakukan pengakuan beban sebagai berikut:

- 1) biaya yang terjadi terkait dengan pembiayaan *musyarakah* tidak diakui sebagai pembiayaan *musyarakat*; dan
- 2) kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *musyarakah*.

Belum seluruh praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Praktik pengakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

2. Analisis Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

Pengukuran pembiayaan *musyarakah* dalam PSAK No. 59 paragraf 42 adalah sebagai berikut:

- a. pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk:
 - 1) kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
 - 2) aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan; dan
- b. biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.

Sementara pengukuran investasi musyarakat dalam PSAK No. 106 paragraf 28 adalah sebagai berikut:

- a. dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
- b. dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - 1) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
 - 2) kerugian pada saat terjadinya.

Praktik pengukuran akuntansi pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Hal tersebut telah sesuai karena BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengukur pembiayaan *musyarakah* sejumlah uang yang dibayarkan BPRS kepada nasabah pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan *musyarakah* disetujui.

3. Analisis Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

Komponen laporan keuangan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta yang telah dibuat terdiri dari neraca, lapran laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih, serta catatan atas laporan keuangan. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta menyajikan komponen laporan keuangan seperti laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan danazakat, infak, dan *shadaqah* (ZIS), serta laporan sumber penggunaan dana *qardhul hasan*. Namun, kekosongan nasabah yang melakukan transaksi-transaksi tersebut sepanjang tahun 2015 membuat BPRS tidak menyajikan ketiga komponen laporan keuangan tersebut pada tahun 2015.

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta menyajikan laporan laba rugi yang terdiri dari pos pendapatan, beban usaha, hasil usaha kotor, taksiran pajak penghasilan, dan sisa hasil usaha. Penjelasan secara rinci pos pendapatan dan beban dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Taksiran pajak penghasilan dihitung dari hasil usaha kotor yang diperoleh dari pendapatan dikurangi beban usaha. Sisa hasil usaha diperoleh setelah mengurangi hasil usaha kotor dengan taksiran pajak penghasilan.

4. Analisis Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta telah mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *musyarakah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha *musyarakah* dalam akad *musyarakah*. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta menyajikan laporan distribusi bagi hasil yang mengungkapkan kisaran persentase bagi hasil dari tabungan, deposito, dan simpanan lainnya.

Catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengungkapkan gambaran umum mengenai laba BPRS dan kebijakan akuntansi yang dipakai. Kebijakan akuntansi tersebut antara lain terdiri dari metode penyusutan aset tetap, metode perhitungan sisa hasil usaha, penjelasan atas pos-pos laporan keuangan, serta analisa dan perhitungan rasio nilai rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

Berdasarkan analisis data di atas, dapat diketahui bahwa praktik pengungkapan akuntansi belum seluruhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *musyarakah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *musyarakah*.

C. Pembahasan

1. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (KDPPLKS, Paragraf 109) dijelaskan bahwa:

Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi, pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Dalam PSAK No. 59 paragraf 47, laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan *nisbah* yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*, sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Begitu juga dalam PSAK No. 106 paragraf 109, keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas) atau sesuai *nisbah* yang disepakati oleh para

mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan.

Pada praktiknya, pengakuan penghasilan usaha di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena perhitungan *nisbah* bagi hasil diakui dari persentase untuk menentukan perkiraan pendapatan penghasilan. Dalam Ariani Kusumasari (2011), pengakuan keuntungan pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Malioboro juga belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 dikarenakan anggota (pengelola dana) yang menerima pembiayaan kurang dari Rp10.000.000,00 tidak membuat laporan keuangan sehingga penentuan bagi hasil dihitung dari analisa kelayakan usaha pada formulir pengajuan pembiayaan.

Nisbah bagi hasil seharusnya diperoleh dari persentase bagi hasil yang dihitung dari keuntungan riil yang didapat nasabah. Praktik tersebut sulit dilakukan karena sebagian besar usaha yang dimiliki para nasabah adalah usaha mikro dan kecil yang tidak melakukan pembukuan. Sedangkan penentuan persentase *nisbah* pada awal perjanjian dilakukan sebagai antisipasi karena kekhawatiran pihak BPRS apabila nasabah tidak jujur dalam melaporkan keuntungan hasil usahanya.

2. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

Setelah membahas tentang pengakuan, hal yang diakui harus diukur. “Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu (KDPPLKS, Paragraf 127).

Berdasarkan PSAK No. 59 paragraf 42, pengukuran pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, sementara biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*. Dalam PSAK No. 106 paragraf 38, pengukuran investasi *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.

Pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, pembiayaan *musyarakah* diukur sejumlah uang yang dibayarkan BPRS pada saat pencairan dana. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengukuran akuntansi pembiayaan *musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta sudah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Tidak terdapat pengukuran aset non-kas karena BPRS tidak melayani pembiayaan dalam bentuk investasi aset non-kas.

3. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

Penyajian merupakan suatu hal bagaimana transaksi-transaksi disajikan dalam laporan keuangan sehingga dapat dibaca oleh pihak-pihak yang membutuhkan seperti manajemen dan masyarakat umum. Pembahasan tentang perlakuan akuntansi untuk penyajian atas pembiayaan *musyarakah* meliputi PSAK No. 59 paragraf 152-155, paragraf 162-165, paragraf 172, dan paragraf 178, serta PSAK No. 106 paragraf 36.

Ariani Kusumasari (2011) menjelaskan bahwa penyajian neraca di BMT Beringharjo Cabang Malioboro belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena tidak ada pengelompokkan unsur-unsur neraca, melainkan langsung mencantumkan akun-akun dari unsur-unsur neraca, serta adanya ketidaksesuaian penempatan letak akun *ijarah* yang seharusnya diletakkan setelah akun persediaan. Hal tersebut sama dengan penyajian neraca yang ada di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Tidak ada pengelompokkan unsur-unsur neraca, tetapi akun-akun dari unsur-unsur neraca langsung tercantum. Selain itu, ketidaksesuaian penempatan letak akun seperti akun *ijarah* yang seharusnya diletakkan setelah akun persediaan atau akun *istishna'* yang seharusnya diletakkan sebelum akun *ijarah* pun masih terjadi. Akan lebih baik jika BPRS Formes Sleman, Yogyakarta memperhatikan penyajian akuntansi transaksi pembiayaan

musyarakah agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

4. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

Menurut Siegel dan Shim (1994: 147), “pengungkapan adalah informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan sebagai catatan kaki atau tambahan”. Pembahasan tentang pengungkapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* meliputi PSAK No. 59 paragraf 196 dan paragraf 197 serta PSAK No. 106 paragraf 37.

Dalam Ariani Kusumasari (2011), pengungkapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Malioboro telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Sebagai contohnya, BMT mengungkapkan penyisihan kerugian pembiayaan *musyarakah* pada neraca. Pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, pengungkapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Ketidaksesuaian tersebut karena laporan keuangan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tidak mengungkapkan penyisihan kerugian pembiayaan *musyarakah* dan kerugian atas penurunan nilai aktiva *musyarakah* juga tidak diungkapkan.

Menurut peneliti, pengungkapan berfungsi sebagai penyedia kelengkapan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan agar dapat dibaca dan digunakan oleh pemakai laporan keuangan secara

bijak. Oleh karena itu, sebaiknya BPRS Formes Sleman, Yogyakarta melakukan penyesuaian terhadap pengungkapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada subjek penelitian, yaitu BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. BPRS tersebut merupakan kantor pusat, namun laporan keuangan yang diijinkan untuk dijadikan bahan penelitian terbatas pada laporan keuangan tahun 2015 yang telah dipublikasikan di website *www.bi.go.id*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengenai pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena pengakuan keuntungan dihitung bukan dari laporan keuangan melainkan atas hasil proyeksi.
2. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.
3. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Penyajian akuntansi pada neraca tidak terdapat

pengelompokkan unsur-unsur neraca, tetapi langsung mencantumkan akun-akun dari unsur neraca.

4. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *musyarakah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *musyarakah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran baik bagi manajemen BPRS Formes Sleman, Yogyakarta terkait dan bagi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Bagi BPRS Formes Sleman, Yogyakarta diharapkan dapat:
 - a. memperbaiki format penyajian akuntansi pada laporan keuangan agar sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.
 - b. mengungkapkan penyisihan kerugian investasi *musyarakah* dan besarnya kerugian akibat penurunan nilai aktiva *musyarakah* dalam laporan keuangannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah studi kasus pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta sehingga dapat menganalisa kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan *musyarakah* secara lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2005). Dari *Murabahah* Menuju *Musyarakah*, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel. *JAAI*, 9, 159-169.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syari'ah*.
- Digilib UIN Sunan Kalijaga. (2008). "Skripsi oleh Sari Asih Indah Diyanah: Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 59 (Studi Kasus pada BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta)". Diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/2739/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, pada tanggal 27 Oktober 2015.
- E-Jurnal Gloria Yuris. (2013). "Skripsi oleh Neni Suryani: Penerapan Akad *Musyarakah* dalam Pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pontianak". Diambil dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/3481>, pada tanggal 27 Oktober 2015.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fimadani. (11 Januari 2012). *Karakteristik Bank Syariah*. Diambil pada tanggal 15 September 2015, dari <http://www.fimadani.com/karakteristik-bank-syariah/>
- Harahap, S. S. (1997). *Akuntansi Islam*. Jakarta: BUMI AKSARA.
- Harahap, S. S., Wiroso, dan Yusuf, Muhammad. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*. Edisi Pertama. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kusumasari, A. (2011). “Analisis Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 Pada BMT Beringharjo Cabang Malioboro”. *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lewis, M. K. & Algaoud, L. M. (2007). *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*. (Terjemahan Burhan Subrata). Jakarta: Serambi.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Diambil dari: <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=11&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, pada tanggal 20 Oktober 2015.
- Miles, M. B. and Huberman, M. A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. (2005). *Pengantar Akuntansi Syari'ah (Ed. 2)*. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria.
- _____. (2008). *Bank Syari'ah, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: EKONISIA.

- Nikensari, S. I. (2012). *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Sejarah & Aplikasinya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Nurhayati, S. dan Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia (Ed. 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Perwataatmadja, K. Dan Antonio, M. S. (1999). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siegel, J. G. Dan Shim, J. K. (1994). *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: Elexa Komputindo.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam (Ed. 1)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soraya. (2011). "Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK 105". *Skripsi*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatillah.
- Subagyo, dkk. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sudarsono. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumitro, W. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah (Ed. 1)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Syahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Wong, L. P. (2008). Data Analysis in Qualitative Research: A Brief Guide To Using Nvivo. *Malaysian Family Physician Journal*, 3, 14-20.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Diajukan kepada Bagian Customer Service dan Bagian Akuntansi

1. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Formes Sleman, Yogyakarta?
2. Produk apa saja yang dihasilkan oleh BPRS Formes Sleman, Yogyakarta?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta?
4. Berapa jumlah nasabah yang mendapatkan pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2015?
5. Berapa total pembiayaan *musyarakah* yang telah dilakukan pada tahun 2015?
6. Apakah BPRS Formes Sleman, Yogyakarta telah menerapkan rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah*?
7. Pedoman apa yang digunakan oleh BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dalam melakukan pembiayaan *musyarakah*?
8. Siapakah yang melakukan pengawasan dalam proses pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta?
9. Bagaimana proses pencatatan akuntansi transaksi pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta?
10. Bagaimana proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan pada transaksi pembiayaan *musyarakat* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta?
11. Sejauh mana BPRS Formes Sleman, Yogyakarta berpedoman pada PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 untuk transaksi pembiayaan *musyarakah*?

Laporan Keuangan Publikasi Triwulan
PT. BPRS FORMES
JL. GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode Juni-2015

NERACA

Ribuan Rp.

Pos-pos		Posisi Juni 2015	Posisi Juni 2014	Pos-pos		Posisi Juni 2015	Posisi Juni 2014
AKTIVA				PASIVA			
	Kas	436.039	263.280		Kewajiban Segera	269.201	148.438
	Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0		Tabungan Wadiah	1.213.378	1.299.393
	Penempatan Pada Bank Lain	1.678.276	1.897.268		Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
	Piutang Murabahah	15.619.464	14.315.953		Kewajiban Lain-Lain	5.627.934	4.768.787
	Piutang Salam	0	0		Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0
	Piutang Istishna'	0	0		Pinjaman Subordinasi	0	0
	Pembiayaan Mudharabah	895.628	721.893		Modal Pinjaman	0	0
	Pembiayaan Musyarakah	653.031	929.143		Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
	Ijarah	0	0		a. Tabungan Mudharabah	2.514.853	4.189.210
	Qardh	0	11.151		b. Deposito Mudharabah	10.301.150	9.750.400
	Piutang Multijasa	1.069.398	1.317.337				
	Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	414.204	204.403		Ekuitas :	0	0
	Aktiva Istishna'	0	0		a. Modal Disetor	2.000.000	1.500.000
	Persediaan	0	0		b. Tambahan Modal Disetor	64.530	64.530
	Aktiva Tetap dan Inventaris	2.413.861	2.284.007		c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
	Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	534.253	368.306		d. Cadangan	158.076	105.339
	Aktiva Lain-Lain	489.574	821.029		e. Saldo Laba(Rugi)	157.692	162.255
	JUMLAH AKTIVA	22.306.814	21.988.352		JUMLAH PASIVA	22.306.814	21.988.352

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT. BPRS FORMES
JL GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode: Juni-2015
Laporan Laba Rugi

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Juni 2015	Posisi Juni 2014
I	PENDAPATAN OPERASIONAL	2,217,716	1,896,943
	1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	1,811,746	1,735,091
	a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	1,737,871	1,568,933
	b. Dari Bank Indonesia	0	0
	c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia	73,875	166,158
	2. Pendapatan Operasional Lainnya	405,970	161,852
II	BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	879,324	890,654
	1. Pihak Ketiga Bukan Bank	620,948	598,995
	a. Tabungan Mudharabah	67,414	90,359
	b. Deposito Mudharabah	553,534	508,636
	c. Lainnya	0	0
	2. Bank Indonesia	0	0
	3. Bank - bank lain	258,376	291,659
III	PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)	1,338,392	1,006,289
IV	BEBAN OPERASIONAL	1,160,348	824,142
	1. Bonus Titipan Wadiah	7,054	8,445
	2. Beban Administrasi dan Umum	224,196	237,168
	3. Beban Personalia	524,071	472,452
	4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	389,519	94,492
	5. Lainnya	15,508	11,585
V	LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV)	178,044	182,147
VI	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	594	300
VII	BEBAN NON OPERASIONAL	240	300
VIII	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	178,398	182,147
IX	ZAKAT	0	0
X	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	20,706	19,892
XI	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	157,692	162,255

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT. BPRS FORMES
JL GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode: Juni-2015
Laporan Komitmen dan Kontinjensi

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Juni 2015	Posisi Juni 2014
I	TAGIHAN KOMITMEN	0	0
	a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	0	0
	b. Lainnya	0	0
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
	a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
	b. Lainnya	0	0
III	TAGIHAN KONTINJENSI	155,880	110,175
	a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
	b. Pendapatan yang Akan Diterima	155,880	110,175
	c. Lainnya	0	0
IV	AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	0	41,544
V	PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	0	0

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT. BPRS FORMES
JL GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode: Juni-2015
Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

No	Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1	Penempatan Pada Bank Lain	1,678,276	0	0	0	1,678,276
2	Piutang :	15,241,751	714,171	445,051	287,889	16,688,862
	a. Piutang Murabahah	14,428,536	584,358	318,681	287,889	15,619,464
	b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
	c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
	d. Qardh	0	0	0	0	0
	e. Piutang Multijasa	813,215	129,813	126,370	0	1,069,398
3	Pembiayaan :	1,521,530	0	0	27,129	1,548,659
	a. Mudharabah	895,628	0	0	0	895,628
	b. Musyarakah	625,902	0	0	27,129	653,031
4	Ijarah	0	0	0	0	0
5	Jumlah Aktiva Produktif	18,441,557	714,171	445,051	315,018	19,915,797
6	Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	217,103	0	0	0	217,103
7	Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)	-	-	-	-	8.08
8	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	92,207	12,757	15,009	11,403	131,376
9	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	116,508	49,535	104,278	128,124	398,445
10	KPMM(%)	-	-	-	-	12.58
11	FDR(%)	-	-	-	-	130
12	ROA(%)	-	-	-	-	1.42
13	ROE(%)	-	-	-	-	19.65

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT. BPRS FORMES
JL GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode: Juni-2015
Laporan Distribusi Bagi Hasil

Jenis Penghimpunan	Saldo rata - rata (Ribuan Rp)	Pendapatan yang harus dibagi Hasil (Ribuan Rp)	Nisbah	Porsi Pemilik Dana Jumlah Bonus dan Bagi Hasil (Ribuan Rp)	Indikasi Rate of Return %
	A	B		D	E
Tabungan Mudharabah	375,393	7,407	23	1,759	5,62
Deposito Mudharabah 1 Bulan	64,333	924	35	326	6,08
Deposito Mudharabah 3 Bulan	874,833	17,262	36	6,214	8,52
Deposito Mudharabah 6 Bulan	608,489	12,006	37	4,517	8,91
Deposito Mudharabah 12 Bulan	2,215,092	43,707	38	16,827	9,12
Total	5,651,780	82,517	-	30,854	6,55
Tabungan Wadiah	1,513,640	1,211	0	1,211	0,96

Laporan Keuangan Publikasi Triwulan
PT. BPRS FORMES
JL. GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode September-2015
NERACA

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi September 2015	Posisi September 2014	Pos-pos	Posisi September 2015	Posisi September 2014
AKTIVA			PASIVA		
Kas	485.296	333.433	Kewajiban Segera	218.187	305.966
Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0	Tabungan Wadiah	1.675.674	1.453.150
Penempatan Pada Bank Lain	3.802.084	2.265.557	Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
Piutang Murabahah	16.743.294	14.593.410	Kewajiban Lain-Lain	5.670.477	4.795.690
Piutang Salam	0	0	Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0
Piutang Istishna'	0	0	Pinjaman Subordinasi	0	0
Pembiayaan Mudharabah	745.099	595.708	Modal Pinjaman	0	0
Pembiayaan Musyarakah	522.130	689.175	Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
Ijarah	0	0	a. Tabungan Mudharabah	5.093.396	3.911.520
Qardh	0	9.801	b. Deposito Mudharabah	10.060.150	10.162.400
Piutang Multijasa	1.065.369	1.466.658			
Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	399.894	257.162	Ekuitas :	0	0
Aktiva Istishna'	0	0	a. Modal Disetor	2.000.000	1.500.000
Persediaan	0	0	b. Tambahan Modal Disetor	64.530	64.530
Aktiva Tetap dan Inventaris	2.413.862	2.291.324	c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	564.609	400.189	d. Cadangan	158.075	105.339
Aktiva Lain-Lain	496.335	859.289	e. Saldo Laba(Rugi)	368.477	148.409
JUMLAH AKTIVA	25.308.966	22.447.004	JUMLAH PASIVA	25.308.966	22.447.004

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT. BPRS FORMES
JL GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode: September-2015
Laporan Laba Rugi

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi September 2015	Posisi September 2014
I	PENDAPATAN OPERASIONAL	3,333,555	2,873,943
	1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	2,733,241	2,580,569
	a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	2,640,239	2,393,717
	b. Dari Bank Indonesia	0	0
	c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia	93,002	186,852
	2. Pendapatan Operasional Lainnya	600,314	293,374
II	BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	1,210,400	1,347,693
	1. Pihak Ketiga Bukan Bank	841,048	915,314
	a. Tabungan Mudharabah	90,435	126,360
	b. Deposito Mudharabah	750,613	788,954
	c. Lainnya	0	0
	2. Bank Indonesia	0	0
	3. Bank - bank lain	369,352	432,379
III	PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)	2,123,155	1,526,250
IV	BEBAN OPERASIONAL	1,722,579	1,351,557
	1. Bonus Titipan Wadiah	10,428	11,392
	2. Beban Administrasi dan Umum	414,461	347,301
	3. Beban Personalia	887,800	758,344
	4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	389,674	220,789
	5. Lainnya	20,216	13,731
V	LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV)	400,576	174,693
VI	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	594	300
VII	BEBAN NON OPERASIONAL	240	300
VIII	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	400,930	174,693
IX	ZAKAT	0	0
X	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	32,453	26,284
XI	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	368,477	148,409

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT. BPRS FORMES
JL GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode: September-2015
Laporan Komitmen dan Kontinjensi

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi September 2015	Posisi September 2014
I	TAGIHAN KOMITMEN	0	0
	a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	0	0
	b. Lainnya	0	0
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
	a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
	b. Lainnya	0	0
III	TAGIHAN KONTINJENSI	117,741	108,135
	a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
	b. Pendapatan yang Akan Diterima	117,741	108,135
	c. Lainnya	0	0
IV	AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	0	41,544
V	PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	0	0

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT. BPRS FORMES
JL GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode: September-2015
Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

No	Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1	Penempatan Pada Bank Lain	3,802,084	0	0	0	3,802,084
2	Piutang :	16,189,563	913,204	319,822	386,074	17,808,663
	a. Piutang Murabahah	15,401,277	849,763	216,180	276,074	16,743,294
	b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
	c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
	d. Qardh	0	0	0	0	0
	e. Piutang Multijasa	788,286	63,441	103,642	110,000	1,065,369
3	Pembiayaan :	1,122,249	0	106,463	38,517	1,267,229
	a. Mudharabah	627,248	0	106,463	11,388	745,099
	b. Musyarakah	495,001	0	0	27,129	522,130
4	Ijarah	0	0	0	0	0
5	Jumlah Aktiva Produktif	21,113,896	913,204	426,285	424,591	22,877,976
6	Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	76,952	120,740	0	0	197,692
7	Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)	-	-	-	-	9.25
8	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	105,569	21,994	10,418	7,827	145,808
9	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	116,887	156,496	3,396	107,356	384,135
10	KPMM(%)	-	-	-	-	12.69
11	FDR(%)	-	-	-	-	113.35
12	ROA(%)	-	-	-	-	2.47
13	ROE(%)	-	-	-	-	25.59

Laporan Keuangan Publikasi Triwulan
PT BPRS FORMES
JL. GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode Desember-2015
NERACA

Ribuan Rp.

Pos-pos		Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014	Pos-pos		Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
AKTIVA				PASIVA			
	Kas	286,818	142,868		Kewajiban Segera	452,96	232,406
	Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0		Tabungan Wadiah	1,717,747	1,638,002
	Penempatan Pada Bank Lain	6,732,195	5,488,672		Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
	Piutang Murabahah	15,799,508	14,486,388		Kewajiban Lain-Lain	5,237,401	4,587,695
	Piutang Salam	0	0		Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0
	Piutang Istishna'	0	0		Pinjaman Subordinasi	0	0
	Pembiayaan Mudharabah	1,136,530	502,445		Modal Pinjaman	0	0
	Pembiayaan Musyarakah	213,581	682,143		Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
	Ijarah	0	0		a. Tabungan Mudharabah	6,929,039	5,436,956
	Qardh	0	8,951		b. Deposito Mudharabah	10,522,750	10,481,200
	Piutang Multijasa	749,345	1,283,896				
	Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	330,353	240,047		Ekuitas :	0	0
	Aktiva Istishna'	0	0		a. Modal Disetor	2,000,000	1,500,000
	Persediaan	0	0		b. Tambahan Modal Disetor	64,53	564,53
	Aktiva Tetap dan Inventaris	2,413,862	2,348,469		c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
	Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	594,914	507,028		d. Cadangan	158,075	105,339
	Aktiva Lain-Lain	994,434	619,815		e. Saldo Laba(Rugi)	318,504	270,444
	JUMLAH AKTIVA	27,401,006	24,816,572		JUMLAH PASIVA	27,401,006	24,816,572

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT. BPRS FORMES
JL GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode: Desember-2015
Laporan Laba Rugi

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
I	PENDAPATAN OPERASIONAL	4,462,881	4,086,538
	1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	3,772,456	3,571,248
	a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	3,638,766	3,353,949
	b. Dari Bank Indonesia	0	0
	c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia	133,690	217,299
	2. Pendapatan Operasional Lainnya	690,425	515,290
II	BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	1,540,077	1,819,405
	1. Pihak Ketiga Bukan Bank	1,068,263	1,257,561
	a. Tabungan Mudharabah	123,776	174,695
	b. Deposito Mudharabah	944,487	1,082,866
	c. Lainnya	0	0
	2. Bank Indonesia	0	0
	3. Bank - bank lain	471,814	561,844
III	PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)	2,922,804	2,267,133
IV	BEBAN OPERASIONAL	2,561,399	1,954,480
	1. Bonus Titipan Wadiah	14,665	14,849
	2. Beban Administrasi dan Umum	787,408	549,366
	3. Beban Personalia	1,321,891	1,106,605
	4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	389,769	266,958
	5. Lainnya	47,666	16,702
V	LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV)	361,405	312,653
VI	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	594	300
VII	BEBAN NON OPERASIONAL	440	300
VIII	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	361,559	312,653
IX	ZAKAT	0	0
X	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	43,055	42,209
XI	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	318,504	270,444

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT. BPRS FORMES
JL GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode: Desember-2015
Laporan Komitmen dan Kontinjensi

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
I	TAGIHAN KOMITMEN	0	0
	a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	0	0
	b. Lainnya	0	0
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
	a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
	b. Lainnya	0	0
III	TAGIHAN KONTINJENSI	87,846	158,198
	a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
	b. Pendapatan yang Akan Diterima	87,846	158,198
	c. Lainnya	0	0
IV	AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	49,043	80,769
V	PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	0	0

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT. BPRS FORMES
JL GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode: Desember-2015
Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

(Ribuan Rp.)

No	Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1	Penempatan Pada Bank Lain	6,732,195	0	0	0	6,732,195
2	Piutang :	15,696,748	652,520	120,041	79,544	16,548,853
	a. Piutang Murabahah	14,975,369	633,405	111,190	79,544	15,799,508
	b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
	c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
	d. Qardh	0	0	0	0	0
	e. Piutang Multijasa	721,379	19,115	8,851	0	749,345
3	Pembiayaan :	1,327,856	0	0	22,255	1,350,111
	a. Mudharabah	1,136,530	0	0	0	1,136,530
	b. Musyarakah	191,326	0	0	22,255	213,581
4	Ijarah	0	0	0	0	0
5	Jumlah Aktiva Produktif	23,756,799	652,520	120,041	101,799	24,631,159
6	Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	170,722	0	0	0	170,722
7	Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)	-	-	-	-	4.88
8	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	118,783	10,595	5,775	22,782	157,935
9	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	179,265	31,566	60,635	38,313	309,779
10	KPMM(%)	-	-	-	-	13.41
11	FDR(%)	-	-	-	-	97.13
12	ROA(%)	-	-	-	-	1.40
13	ROE(%)	-	-	-	-	20.84

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT. BPRS FORMES
JL GITO GATI KM 1 GROJOGAN PANDOWOHARJO SLEMAN
Periode: Desember-2015
Laporan Distribusi Bagi Hasil

Jenis Penghimpunan	Saldo rata - rata (Ribuan Rp)	Pendapatan yang harus dibagi Hasil (Ribuan Rp)	Nisbah	Porsi Pemilik Dana Jumlah Bonus dan Bagi Hasil (Ribuan Rp)	Indikasi Rate of Return %
	A	B		D	E
Tabungan Wadiah	1,597,500	1,278	0	1,278	0,96
Tabungan Mudharabah	3,132,364	49,871	25	12,921	4,95
Deposito Mudharabah 1 Bulan	246,508	3,927	34	1,348	6,56
Deposito Mudharabah 3 Bulan	1,496,977	23,848	34	8,287	6,64
Deposito Mudharabah 6 Bulan	508,276	8,097	37	3,060	7,22
Deposito Mudharabah 12 Bulan	2,750,132	43,812	38	16,867	7,36
Total	9,731,757	130,833	-	43,761	5,40